

KONFLIK WARGA TERDAMPAK DENGAN PENGELOLA TPST PIYUNGAN, BANTUL, DI YOGYAKARTA

CONFLICT OF CITIZENS AFFECTED WITH MANAGER OF TPST PIYUNGAN, BANTUL, DI YOGYAKARTA

Oleh : Cheni Maharani Putri, dan Farida Hanum, Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
Email : cheni1881fis2016@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian memfokuskan pada konflik antara warga terdampak dengan pengelola TPST Piyungan. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor dan bentuk konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi teknik pengambilan sampel purposive sampling. Informan dalam penelitian berjumlah 15 orang yaitu: warga terdampak, pemerintah desa setempat, dan pihak pengelola TPST Piyungan. Validitas data menggunakan triangulasi sumber data dan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik di TPST Piyungan terjadi antara warga terdampak dengan pengelola. Faktor konflik yaitu : kurangnya komunikasi yang efektif warga-pengelola, kurangnya usaha membangun kerjasama antara warga-pengelola untuk menyelesaikan dampak sampah, terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan dari TPST yang dirasakan oleh warga sekitar, dan kompensasi yang diberikan pengelola dirasa kurang efektif dibandingkan dampak negatif yang dirasakan warga sekitar. Konflik diwujudkan dengan aksi blokade pintu masuk TPST Piyungan oleh warga karena tidak terpenuhinya kebutuhan akan lingkungan yang sehat dan baik (konflik kebutuhan lingkungan) dengan mengajukan beberapa tuntutan kepada pengelola (konflik realistik). Konflik berdampak pada meningkatnya solidaritas kelompok warga terdampak untuk melawan, menurunnya tingkat kepercayaan warga-pengelola dengan menuntut segera solusi permasalahan sampah di TPST, dan mempertegas tugas pengelolaan sampah di TPST.

Kata kunci: Konflik TPST, TPST Piyungan, Pengelolaan Sampah

Abstract

The research focuses on the conflict between the affected people and the TPST Piyungan manager. The research objective was to determine the factors and forms of conflict. This study uses descriptive qualitative methods, data collection observation, interviews, and documentation of purposive sampling technique. There were 15 informants in the study, namely : affected residents, the local village government, and the Piyungan TPST manager. The validity of the data used triangulation of data sources and data analysis techniques from Miles and Huberman. The results showed that the conflict at TPST Piyungan occurred between the affected residents and the manager. Conflict factors are lack of effective community-manager communication, lack of efforts to build cooperation between community-managers to resolve the impact of waste, pollution and environmental damage from TPST that are felt by local residents, and compensation provided by managers is felt to be less effective than the negative impacts that felt by local residents. The conflict was manifested by the action of blocking the entrance to the TPST Piyungan by residents because the need for a healthy and good environment was not fulfilled (conflict of environmental needs) by submitting several demands to the manager (realistic conflict). The conflict resulted in increased solidarity from the affected community groups to fight back, decreased the level of trust between residents and managers by demanding an immediate solution to the waste problem at TPST, and emphasizing the task of waste management at TPST.

Keywords: Conflict TPST, TPST Piyungan, Waste Management

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 81 Tahun 2012, "Sampah rumah tangga merupakan sampah yang dihasilkan manusia dalam kegiatan sehari-hari, sedangkan sampah sejenis rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya". Sampah yang dihasilkan tersebut dikelola di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Pengadaan TPST dilakukan dengan pertimbangan teknis yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri PU No. 3 Tahun 2013 yaitu, fungsi TPST, penentuan komponen sampah, identifikasi spesifikasi produk, alir proses pengolahan, beban pengolahan, penentuan lay out dan disain, peralatan, upaya pengendalian kualitas lingkungan, pertimbangan estetika, dan adaptabilitas peralatan, sehingga diharapkan tidak berdampak lingkungan dan tidak merugikan masyarakat. Kenyataannya beberapa TPA/TPST berdampak lingkungan dan merugikan masyarakat, dan tidak jarang menimbulkan konflik seperti yang terjadi di TPST Cipeucang di Serpong, TPST Bojong di Bogor. Sedangkan di DI Yogyakarta permasalahan pengelolaan sampah dan degradasi lingkungan yang terjadi di TPST Piyungan menimbulkan konflik yang dilakukan warga diwujudkan dengan adanya aksi blokade pintu masuk TPST pada tahun 2015,2018,2019.

Tuntutan yang disampaikan warga terkait pengaspalan jalan rusak, penerangan jalan yang mati, pemfoggingan lalat dan nyamuk yang macet, pembangunan talud, larangan

pembuangan sampah dibadan jalan, dan kompensasi (Setyono, 2018).

Permasalahan yang terjadi di TPST Piyungan sejak 2015 hingga saat ini masih belum dapat terselesaikan, selain itu adanya TPST Piyungan juga memberikan dampak besar bagi lingkungan fisik dan sosial. Penelitian difokuskan untuk melihat faktor penyebab terjadinya konflik, dan bentuk konflik yang terjadi antara warga terdampak dengan pengelola TPST Piyungan.

KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

1. Permasalahan sampah pada masyarakat kota

Permasalahan sampah diperkotaan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu volume sampah yang melebihi data tampung TPA, lahan TPA yang semakin sempit, penggunaan teknologi yang tidak optimal, sampah yang sudah menjadi kompos tidak dikeluarkan dari TPA, management pengelolaan sampah tidak efektif, pengelolaan sampa dirasa tidak memberikan dampak positif bagi lingkungan, dan kurangnya dukungan kebijakan pemerintah (Sudrajat, 2006 : 6).

Permasalahan sampah di Kota Yogyakarta dilihat dari tiga sudut pandang yaitu, permasalahan di hilir, proses dan hulu. Permasalahan di hilir berupa permasalahan yang timbul dimasyarakat. Permasalahan di proses merupakan permasalahan pelayanan yang baru mencapai 85%. Dan permasalahan di hulu merupakan permasalahan di TPA Piyunga (Mulasari, dkk, 2016).

2. Pengelolaan dan permasalahan TPST/TPA di masyarakat.

Berdasarkan alternatif teknologi pengelolaan sampah terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu terkait aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan teknis. Pada aspek sosial berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, rendahnya potensi terjadi konflik dengan masyarakat, terbukanya lapangan usaha, serta penguatan peran aktif masyarakat. Pada aspek ekonomi terkait penekanan biaya pengelolaan, dan menghasilkan pendapatan asli daerah. Pada aspek lingkungan terkait meminimalisir penemuan lingkungan (tanah, air, dan udara), meminimalisir munculnya penyakit, dan meminimalisir penurunan estetika berdasarkan arahan pengembangan kota. Pada aspek teknis terkait pengurangan tumpukan sampah, dan mengatasi permasalahan lahan (Amurwaraharja (dalam Mahyudin 2017:67).

Pengelolaan TPA yang tidak sesuai dengan standart dapat menimbulkan permasalahan lingkungan fisik dan sosial yang tidak jarang menimbulkan konflik. Menurut Wirawan (2013:5) Konflik merupakan proses pertentangan yang diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik. Beberapa TPST/TPA yang menyebabkan konflik yaitu TPA Bantargebang di Bekasi, dan TPA Jatiwaringin, sedangkan di DI Yogyakarta terjadi TPST Piyungan.

3. Antroposentris sebagai penyebab konflik lingkungan.

Rene Descartes mengatakan manusia memiliki kedudukan yang lebih terhormat

dibandingkan makhluk lainnya (antroposentris). Manusia antroposentris memiliki kelemahan seperti mengabaikan permasalahan lingkungan yang tidak langsung menyentuh kepentingan manusia, eksploitasi yang selalu berbeda-beda dan berubah-ubah, dan hanya memikirkan kepentingan jangka pendek yang berorientasi pada ekonomi (Sony Keraf dalam Susilo, 2012:61-62).

Degradasi lingkungan yang membahayakan jaminan standar kelayakan minimum hidup dan keamanan kehidupan manusia dapat menyebabkan konflik. Namun dapat dihindari jika institusi politik dapat berperan dengan baik dengan meredam ketidakpuasan pihak yang berkonflik dengan mengakomodasi keluhan-keluhan (Susilo, 2012:164-165). Wirawan (2013:5) melihat konflik sebagai proses pertentangan yang diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan konflik keluaran.

Menurut Lewis A. Coser (dalam Tualeka, 2017:37-38) konflik merupakan proses instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Adanya konflik antar kelompok justru akan memperkuat identitas kelompok dan melindungi agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya. Dahrendorf (dalam Pruitt dan Rubin, 20007:34) menyebutkan kemunculan struggle group menjadi faktor penyebab konflik. Selain Coser (dalam Wirawan (2013:59) melihat konflik realistik sebagai konflik yang muncul dari adanya kekecewaan

terhadap tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan partisipan, dan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan. Simon Fisher (dalam Ghofar, 2014) menyebutkan bahwa konflik disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia seperti fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau terhalangi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilandaskan pada filsafat post-positivisme dengan paradigma interpretif dan konstruktif yang memandang realitas sebagai suatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh pemaknaan, dan hubungan gejala bersifat interaktif (Rustanto, 2015:8). Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan untuk menjelaskan konflik yang terjadi antara warga terdampak dengan pengelola TPST Piyungan.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di TPST Piyungan dan lingkungan sekitarnya. Waktu penelitian dilakukan selama enam bulan terhitung sejak 31 Januari – 24 Juli 2020.

Target/Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di TPST Piyungan meliputi warga terdampak TPST, Pengelola TPST, dan Pemerintah setempat. Pemilihan informan dilakukan dengan pertimbangan

tertentu (purposif sampling) yaitu dampak yang didapatkan dari TPST Piyungan, keterlibatan dalam konflik di TPST Piyungan, dan pemahaman terkait konflik yang terjadi di TPST Piyungan. Informan dalam penelitian yaitu juru bicara warga terdampak, lima warga terdampak, tiga ketua RT (RT04,05 Ngablak Sitimulyo, dan RT02 Sentulrejo Bawuran), dua kepala dukuh (Ngablak, dan Sentulrejo), dua pemerintah desa (Sitimulyo dan Bawuran), dan dua pengelola TPST Piyungan (Kepala Balai dan Staff).

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan instrumen observasi untuk melihat kondisi TPST Piyungan dan lingkungan sekitarnya. Wawancara dilakukan dengan terstruktur kepada warga terdampak, pengelola, dan pemerintah desa setempat. Dokumentasi berupa foto kondisi TPST Piyungan, dokumen yang berkaitan, artikel berita, dan penelitian terdahulu.

Teknik Analisis Data

Teknik menggunakan teknik analisis data milik Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:132-137) meliputi, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Pertama tahap pengumpulan data dilakukan dengan observasi untuk melihat kondisi TPST Piyungan dan lingkungan sekitar, wawancara dilakukan kepada warga terdampak, pengelola TPST, dan pemerintah desa terdampak, dan

pengumpulan dokumen yang diperlukan. Kedua tahap reduksi data yaitu merangkum data yang diperoleh. Ketiga tahap penyajian data yaitu mendisplay data yang diperoleh, dan tahap keempat penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Bagaimana memaknakan data yang diperoleh, kaitannya dengan permasalahan dan tujuan penelitian, perlu dijabarkan dengan jelas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

TPST Piyungan memiliki luas terletak di dua Desa yaitu Sitimulyo dan Bawuran.



Gambar 1. Lokasi TPST Piyungan

Sejak beroprerasinya TPST Piyungan pada tahun 1995 sampai sekarang memberikan dampak yang besar bagi lingkungan fisik dan sosial, dampak negatif merugikan masyarakat dan menimbulkan konflik. Konflik yang terjadi antara warga terdampak dengan pengelola TPST Piyungan.

Faktor penyebab konflik

Faktor yang menyebabkan terjadinya konflik yaitu:

1. Kurangnya komunikasi warga dengan pengelola.

Awal rencana pembangunan TPST Piyungan dilakukan sosialisasi dan pelelangan tanah milik warga yang akan digunakan untuk pembangunan. Namun sosialisasi yang telah dilakukan masih terdapat warga yang memahami bahwa pembuangan sampah yang dimaksud adalah sampah orang (orang yang menyimpang) yang dipindahkan dari pesangrahan Giwangan bertepatan dengan pembangunan terminal Giwangan. Selain terdapat warga yang tinggal dekat dengan TPST tidak mengetahui sama sekali mengenai pembangunan yang akan dilakukan dan keberfungsianya. Hal ini menyebabkan warga tidak memperkirakan dampak yang akan diperoleh dengan adanya TPST.

Pemerintah desa Sitimulyo dilibatkan menjadi tim pengawas TPST Piyungan ketika dikelola Sekertariat Bersama Yogyakarta Sleman Bantul (SekBer KARTAMANTUL), namun setelahnya tidak lagi dilibatkan. Selain itu warga juga melakukan komunikasi dengan kasi TPST Piyungan setiap dua bulan sekali, namun tidak lagi dilakukan. Hal ini menyebabkan warga ataupun pemerintah desa tidak mengetahui program yang dilakukan di TPST.

Menurut Wirawan (2013), komunikasi menjadi salah satu penyebab jika tidak tersedianya informasi secara luas, dan menggunakan bahasa yang tidak dapat dimengerti menyebabkan perbedaan makna dari yang disampaikan komunikator seperti yang terjadi di TPST Piyungan.

2. Kurangnya kerjasama antara warga dengan pengelola.

Awal pembangunan warga sekitar bekerja menjadi tenaga kerja dalam pembangunan, namun hingga saat ini beberapa warga bekerja di kantor TPST Piyungan. Selain itu warga sekitar juga bergantung secara lingkungan dan ekonomi dengan bekerja sebagai pemulung, pengusaha pengepulan dan peternak sapi. Dengan adanya warga yang memulung, dan beternak sapi juga menguntungkan bagi pengelola karena volume sampah dapat berkurang. Walaupun pihak pengelola dan warga terdampak saling bergantung, diantara keduanya tidak terjalin kerjasama.

Pihak pengelola menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota yang membuang sampah di TPST Piyungan. Walaupun tidak bekerjasama dengan pengelola TPST Piyungan, warga memperoleh kompensasi dampak negatif. Wirawan (2013:5) menjelaskan, bahwa konflik sebagai proses pertentangan diekspresikan antara dua pihak yang bergantung mengenai objek konflik.

3. Pencemaran dan kerusakan lingkungan

Pencemaran dan kerusakan lingkungan ditimbulkan TPST Piyungan adalah pencemaran udara berupa bau sampah yang menyengat, kerusakan jalan yang digunakan warga, TPST, dan pertambangan batu, sampah berceceran, dan limbah cair. Permasalahan lingkungan tersebut disebabkan oleh tumpukan sampah yang tidak ditutup dengan lapisan tanah, kendaraan pengangkut sampah yang tidak sesuai dengan standar, oprasional 24jam yang tidak terkontrol, akses jalan yang digunakan bersama,

dan tidak berfungsinya fasilitas pengelolaan sampah.

Kondisi pemukiman yang berbatasan langsung dengan TPST Piyungan berada dalam kategori buruk pada beberapa aspek yaitu kelayakan pengelolaan air limbah, kondisi udara, pengelolaan sampah, dan pelayanan air minum/baku (Ni'mah, 2016). Hal tersebut menjadi faktor penyebab konflik di TPST Piyungan, karena konflik dapat terjadi ketika kebutuhan fisik, mental, dan sosial tidak terpenuhi atau terhambat dalam pemenuhannya (Simon Fisher dalam Gamayanti, 2019:14).

4. Kompensasi dampak negatif yang kurang efektif.

Warga terdampak memperoleh kompensasi dampak negatif, kompensasi yang diperoleh berupa relokasi, pemulihan lingkungan (fogging lalat dan nyamuk), biaya kesehatan dan pengobatan (pelayanan kesehatan gratis secara rutin), dan kompensasi pembangunan sejak tahun 2018 disalurkan melalui pemerintah desa berupa bahan bangunan.

Kompensasi pembangunan diterima oleh warga Desa Sitimulyo Dukuh Banyak III, dan Ngablak, dan warga Desa Bawuran Dukuh Sentulrejo dan Bawuran I. Sedangkan warga yang melakukan aksi blokade dan berkonflik dengan pengelola adalah warga yang tinggal dekat dengan TPST yaitu warga RT 03,04,05 Ngablak, RT 02 Sentulrejo, dan RT 06 Bawuran I, warga beranggapan bahwa kompensasi yang mereka peroleh tidak sebanding dengan dampak

yang ditimbulkan TPST Piyungan. Selain itu dengan adanya kompensasi pembangunan yang berwujud bahan bangunan menimbulkan permasalahan karena warga harus mengeluarkan uang tambahan untuk keperluan upah pekerja bangunan, dan keperluan lainnya.

Pihak yang berkonflik

Pihak-pihak yang berkonflik dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Pihak yang konflik

Pihak yang berkonflik	Keterangan
Warga sekitar TPST Piyungan (Kelompok Guyup Rukun)	Warga yang terdampak langsung kegiatan pengelolaan sampah di TPST Piyungan yaitu warga RT 3, RT 4 dan RT 5 Ngablak, Sitimulyo, dan warga RT 02, dan RT 06 Bawuran, Pleret. Warga mendapatkan dampak negatif TPST Piyungan, sehingga warga menuntut perbaikan pengelolaan serta meminta adanya kompensasi yang layak.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Selaku pihak yang memiliki wewenang untuk mengatur pengelolaan sampah di TPST Piyungan.
Pemerintah Daerah	Selaku pihak pembuat kebijakan mengenai pengelolaan sampah di daerah.
Pemerintah Desa Sitimulyo	Selaku pemerintah di wilayah Sitimulyo yang wilayahnya digunakan sebagai TPST Piyungan dan terdampak, sertasebagai perantarawarga dengan pemerintah daerah.
Pemerintah Desa Bawuran	Selaku pemerintah di wilayah Bawuran yang wilayahnya digunakan sebagai TPST Piyungan dan terdampak,serta sebagai perantara warga dengan pemerintah daerah.

Terjadinya konflik

Kronologi terjadinya konflik dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2. Kronologi konflik

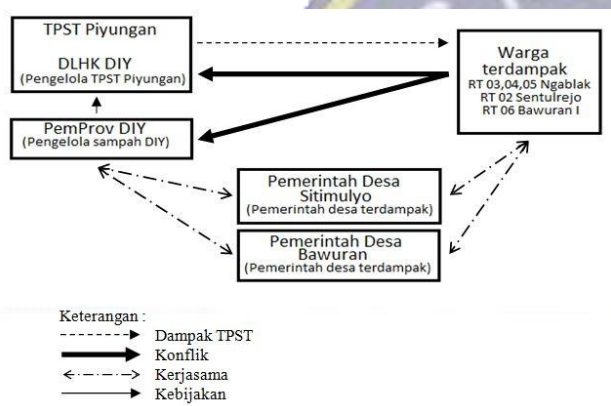
Waktu	Keterangan
1990-1994	TPST Piyungan dibangun
1995	TPST beroperasi dikelola pemerintah daerah DI Yogyakarta
2000	Dikelola Sekretariat Bersama Yogyakarta Sleman Bantul (SekBer KARTAMANTUL)
2010	Dampak negatif mulai dirasakan warga dan mulai dikeluhkan kepada pihak pengelola
2014	Dikelola Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan
29-12-2015	Aksi Blokade pintu masuk TPST Piyungan oleh warga
2017	Pengadaan lahan TPST Piyungan 1,7 Ha
31-12-2018	Aksi Blokade pintu masuk TPST Piyungan oleh warga
2019	Dikelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
24-3-2019	Aksi Blokade pintu masuk TPST Piyungan oleh warga dilakukan 6 hari penutupan
25-3-2019	Sidak oleh DPRD DIY
29-7-2019	Audiensi warga TPST Piyungan di DPRD DIY
31-7-2019	Aksi Blokade pintu masuk TPST Piyungan oleh warga
26-9-2019	Pembahasan penentuan besaran Kompensasi Dampak Negatif TPST Piyungan
8-4-2020	TPST Piyungan ditutup sementara selama 3 hari karena kerusakan fasilitas oprasional

Sejak dibangunnya TPST Piyungan dan beroperasi pada tahun 1995 telah memberikan dampak lingkungan fisik dan sosial. Dampak negatif dirasakan warga sejak sepuluh tahun terakhir dan mulai mengeluhkan permasalahan kepada pihak pengelola, karena belum memperoleh respon seperti yang diinginkan warga sehingga warga melakukan aksi blokade pintu masuk TPST Piyungan beberapa kali. Beberapa diaksi blokade diantaranya masuk ke media pemberitaan yaitu aksi pada tahun 2015, 2018, dan 2019. Tuntutan yang diajukan warga terkait

permasalahan pengelolaan sampah, perbaikan lingkungan, dan permasalahan kompensasi.

Kebutuhan warga sekitar akan lingkungan yang baik dan sehat tidak dapat terpenuhi akibat adanya dampak negatif dari adanya TPST Piyungan. Menurut Simon Fisher (dalam Gamayanti, 2019:14) konflik yang berasal dari kebutuhan dasar manusia secara fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi.

Konflik di TPST Piyungan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Pemerintah Provinsi DIY, warga terdampak TPST Piyungan, dan Pemerintah desa terdampak TPST Piyungan. Peta konflik digambarkan sebagai berikut :

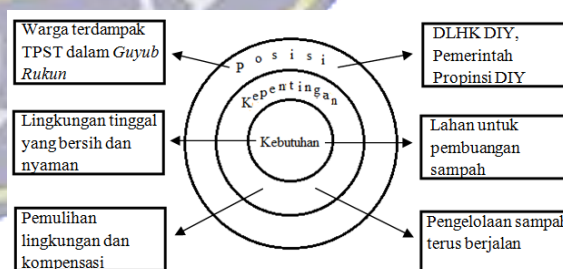


Gambar 2. Pemetaan konflik

Berdasarkan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2013 dijelaskan bahwa pemerintah daerah melakukan pengelolaan sampah. Pemerintah daerah memberikan tugas pengelolaan sampah di TPST Piyungan kepada Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY yang diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 93 Tahun 2018, sebelum dikelola oleh DLHK DIY TPST telah memberikan dampak kepada lingkungan sekitar dan menimbulkan permasalahan. Hal tersebut merugikan warga

sehingga warga melakukan pengaduan kepada pihak pengelola (DLHK DIY dan Pemerintah Provinsi DIY), namun tidak segera ditangani sehingga dilakukannya aksi blokade pintu masuk TPST oleh warga.

Warga juga mengadukan kepada pemerintah desa setempat yang kemudian akan disampaikan ke forum-forum pemerintahan. Selain itu Pemerintah provinsi juga menyalurkan kompensasi pembangunan melalui pemerintah desa sejak tahun 2018 hingga sekarang, pengajuan dilakukan oleh warga ke pemerintah provinsi melalui pemerintah desa dalam rancangan anggaran desa. Konflik yang terjadi di TPST dianalisis dengan alat bantu analisis konflik analogy bawang bombay yaitu analisis digambarkan dengan tiga lapisan, yaitu lapisan terluar merupakan posisi-posisi secara individu atau kelompok yang dapat dilihat dan didengar oleh semua orang, lapisan kedua merupakan kepentingan individu atau kelompok, dan lapisan terdalam merupakan kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh individu atau kelompok (Fisher dalam Sopanudin, 2016:88).



Gambar 3. Analisis bawang bombay

Dibagi menjadi tiga lapisan yaitu, posisi, kepentingan, dan kebutuhan. Pada lapisan posisi terdapat warga terdampak TPST Piyungan yang tergabung dalam kelompok Guyub Rukun, jika dilihat memiliki kepentingan akan pemulihan

lingkungan dan kompensasi yang sesuai. Hal tersebut didasarkan pada kebutuhan akan lingkungan bersih dan nyaman, yang terhalangi pemenuhannya karena dampak lingkungan dari TPST Piyungan.

Disisi lain terdapat pihak pengelola yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dan Pemerintah Propinsi DIY yang memiliki kepentingan pengelolaan sampah di daerah yang harus terus berjalan walaupun kondisi di TPST sudah melewati usia teknik (17tahun). Hal tersebut dilandasi oleh kebutuhan pengelola akan lahan untuk pembuangan sampah daerah.

Bentuk konflik

Bentuk konflik yang terjadi antara warga terdampak dengan pihak pengelola diwujudkan dengan aksi blokade pintu masuk TPST Piyungan yang dilakukan oleh warga terdampak. Sebelum dilakukan aksi blokade beberapa usaha telah dilakukan oleh warga seperti melakukan pengaduan kepada pengelola di kantor TPST Piyungan, dinas terkait, dan pemerintah daerah melalui DPRD DIY, namun belum mencapai hasil yang diinginkan.

Selain itu kemunculan *struggle group* juga menjadi faktor terjadinya konflik, menurut Dahrendorf *struggle group* muncul karena adanya komunikasi yang dilakukan terus-menerus antara orang-orang senasib, adanya pemimpin yang membantu mengartikulasikan ideologi, mengorganisasikan, menyusun rencana untuk melakukan tindakan kelompok, dan adanya legitimasi kelompok atau setidaknya tidak ada tekanan komunitas yang efektif pada kelompok

(Pruitt dan Rubin, 20007:34). Berkumpulnya warga terdampak TPST yang senasib dan memiliki tujuan yang sama dalam perbaikan lingkungan dan pengelolaan sampah. Selain itu adanya seseorang yang mampu mengkoordinasi warga juga menimbulkan kemunculan *struggle group*. Tuntutan yang diajukan warga meliputi perbaikan jalan, dermaga, drainase, talud, fogging lalat dan nyamuk, dan kompensasi perorangan atau perkepala keluarga.

Konflik yang diwujudkan dengan aksi blokade hanya dilakukan oleh warga terdampak yang tinggal dekat dengan TPST Piyungan yaitu Ngablak RT 03,04,05, Sentulrejo RT 02, dan Bawuran I RT 06. Sedangkan untuk warga terdampak lainnya yang telah memperoleh kompensasi pembangunan tidak tergabung dalam kelompok *guyub rukun* (warga yang melakukan aksi), jika dilihat berdasarkan jarak pemukiman warga yang melakukan aksi blokade lebih dekat dengan TPST Piyungan dibandingkan warga terdampak yang tidak melakukan aksi blokade (Banyakan III, Sentulrejo RT 01, Bawuran I). Selain itu kemunculan kepengurusan kelompok *guyub rukun* dapat menjadi katup penyelamat dalam konflik ini karena menjembatani komunikasi antara warga ke pengelola, atau pengelola ke warga.

Dampak konflik

Dari adanya konflik warga terdampak dengan pengelola TPST Piyungan berdampak pada:

1. Meningkatnya solidaritas In-Group kelompok warga

Terbentuknya kelompok warga terdampak tergabung dalam kelompok guyub rukun dikarenakan adanya kesamaan nasib sebagai pihak terdampak TPST dan kepentingan yaitu penemuan kebutuhan akan lingkungan tinggal. Hal tersebut menimbulkan rasa kesetiaan dan tolong-menolong yang diwujudkan dengan ikut berpartisipasi dalam setiap aksi yang telah di rencanakan oleh anggota yang aktif.

2. Berkurangnya rasa percaya kepada pengelola

Dampak lingkungan yang dirasakan warga terdampak sejak sepuluh tahun terakhir belum terselesaikan hingga saat ini, sehingga dilakukannya aksi blokade sebagai desakan kepada pengelola agar permasalahan yang ada segera diatasi. Permasalahan berlarut-larut menyebabkan warga merasa kecewa dan beranggapan bahwa pihak pengelola hanya mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan warga disekitarnya. Selain itu warga juga beranggapan ketika warga tidak mengambil tindakan langsung maka pengelola tidak ada tindakan.

3. Mempertegas tugas pengelolaan sampah

Dengan adanya konflik di TPST Piyungan, pengelolaan sampah di TPST mulai dibenahi sesuai dengan fungsinya. Fungsi balai pengelolaan sampah DLHK menurut peraturan gubernur DIY nomor 93 tahun 2018, meliputi penyusunan program kerja, pelaksanaan penyusunan standart oprasional prosedur pengelolaan sampah, pelaksanaan kegiatan

ketatausahaan balai, pelaksanaan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, pengendalian kualitas lingkungan selama proses pengolahan akhir sampah, pengendalian kualitas residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman, pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan program balai, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi UPT. Beberapa perbaikan pengelolaan TPST yaitu adanya perubahan jam operasional sejak 1 Maret 2019 yang sebelumnya 24 jam menjadi 11 jam, perbaikan dermaga, perbaikan jalan, dan perbaikan talut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Konflik yang terjadi di TPST Piyungan terjadi antara warga terdampak dengan pihak pengelola. Faktor penyebab terjadinya konflik meliputi : kurangnya komunikasi, kurangnya kerjasama antara warga terdampa dengan pihak pengelola, kerusakan dan pencemaran lingkungan, dan kompensasi dampak negatif yang kurang efektif. Bentuk konflik yang diwujudkan oleh warga dengan dilakukannya aksi blokade pintu masuk TPST Piyungan, karena tidak segera ditanganinya permasalahan di TPST Piyungan yang beberapa kali sudah dikeluhkan warga terdampak. Dari adanya konflik TPST Piyungan berdampak pada meningkatnya solidaritas in-group kelompok warga terdampak yang tergabung dalam guyub rukun, berkurangnya rasa percaya kepada pihak pengelola, dan mempertegas tugas pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Gamayanti, Rosa.(2019).Konflik Antara PLTU Indramayu II dengan Warga Mekarsari Dilihat dari Teori Kebutuhan Manusia Simon Fisher.*Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*.1(1):1-70
- Ghofar, Abdul.(2014).Antisipasi Potensi Konflik Sosial Antar Pelajar.*Jurnal AL-MISBAH* 2(2):133-142
- Mahyudin, Rizqi P.(2017).Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir).*Jurnal Teknik Lingkungan*.3(1):66-74
- Mulasari, SA, dkk.(2014).Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik.*Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*.8(8):404-410
- Ni'mah, Ulfatun.(2016).Kelayakan Lingkungan Pemukiman di Sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Kabupaten Bantul.*Jurnal Bumi Indonesia*.5(4)
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 03/Prt/M/2013
- Pruit, Dean G dan Rubin.(2007).*Teori Konflik Sosial*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Rustanto, Bambang.(2015).*Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*.Bandung:PT Remaja Rosdakarya
- Setyono,K.(2018, Desember 31).*Tuntut Kompensasi Warga Blokade TPST Piyungan*. Diakses pada 11 November 2019, dari <https://www.gatra.com/detail/news/376718-Tuntut-Kompensasi-Warga-Blokade-TPST-Piyungan>
- Sopanudin, Akhmad.(2016).*Konflik Lahan Pertanian dalam Pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo*.Skripsi S1.Tidak diterbitkan.Universitas Negeri Yogyakarta
- Sudrajat.(2006).*Mengelola Sampah Kota*.Bogor:Niaga Swadaya
- Sugiyono.(2017).*Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung:Alfabeta CV
- Susilo, Rachmad K D.(2012).*Sosiologi Lingkungan & Sumber Daya Alam :Perspektif Teori & Isu-isu Mutakhir*.Yogyakarta:Ar-Ruzz Media
- Tualeka, M.W.N.(2017).Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern.*Jurnal Al-Hikmah*.3(1):32-48.
- Wirawan. (2013). *Konflik dan Manajemen konflik: Teori,Aplikasi, dan Penelitian*.Jakarta:Salemba Empat